

Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Azizatul Mar'ati

Universitas Sebelas Maret
maratiaiz@gmail.com

Article History

accepted 30/07/2022

approved 30/08/2022

published 30/09/2022

Abstract

The purpose of this literature review is to determine the role of school committees in improving the quality of education. Based on the findings of the literature review, it can be concluded that in carrying out a good role, the school committee must be able to have a role as a consideration, controller, supporter and mediator in improving the quality of education. For this reason, the school committee must prepare a work program or program plan, and in this case the school committee needs good management to achieve the goals that have been set previously. The school committee plays an important role as a thinker, with researcher observations carried out in the form of providing feedback on facilities and infrastructure. In addition, the task of the school committee as a listener and supporter of the school in achieving school goals and improving the quality of education. The school committee does an excellent job of fostering community relations and establishing communication and collaboration with educators, parents, and community leaders to improve the quality of school education.

Keywords: *the school committee, the quality of education*

Abstrak

Tujuan dari literatur review ini adalah untuk mengetahui peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan temuan kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan peran yang baik, komite sekolah harus dapat memiliki peran sebagai pertimbangan, pengontrol, pendukung dan mediator dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu komite sekolah harus menyusun program kerja atau rencana program, dan dalam hal ini komite sekolah memerlukan manajemen yang baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Komite sekolah berperan penting sebagai pemberi pemikiran, dengan observasi peneliti yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian umpan balik sarana dan prasarana. Selain itu tugas komite sekolah sebagai pendengar dan pendukung sekolah dalam pencapaian tujuan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Komite sekolah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam membina hubungan masyarakat dan membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pendidik, orang tua, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah.

Kata kunci: komite sekolah, mutu pendidikan



PENDAHULUAN

Permasalahan dalam pendidikan yang terjadi salah satunya adalah terkait mutu pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, "Mutu pendidikan merupakan kegiatan yang sistemik dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa". Kecerdasan bangsa dapat diperoleh dengan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan sangat berpengaruh terhadap penciptaan manusia yang berdaya saing global.

Kemampuan lulusan untuk transisi ke sekolah lanjutan dan tempat kerja merupakan indikator yang baik dari kualitas lembaga pendidikan. Sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas tinggi harus memiliki input yang dapat diolah sebelum dapat menghasilkan lulusan yang baik. Menurut Sopiati (Nur Zazin, 2011: 66) mengemukakan bahwa kualitas pendidikan secara multidimensi meliputi komponen kualitas *input*, proses, dan *outcome*. Sehingga asupan, proses, dan keluaran semuanya dipertimbangkan dalam penciptaannya. Akibatnya, kualitas pendidikan mengacu pada layanan yang diberikan oleh berbagai lembaga pendidikan kepada peserta didik dan guru yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan dengan bakat, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk memasuki lingkungan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas membutuhkan banyak dukungan dan peran sinergis dari berbagai pihak terkait, yang terdiri dari tiga komponen: sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebagai sebuah institusi, sekolah dasar memegang peranan penting dalam menentukan kualitas generasi penerus bangsa. Dengan adanya tripusat pendidikan yang muncul dari paradigma lama, transisi, dan baru, maka pendidikan yang unggul membutuhkan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan. Menurut Sri Renani Pantjastuti dkk (2008:56), "terkait dengan hubungan yang bersifat birokratis dan hierarkis, sekolah sering memandang masyarakat sebagai pihak yang berada di luar sekolah, kecuali diperlukan. Keluarga, sekolah dan masyarakat akan berhunung jika diperlukan saja. Komitmen insidental, temporer, bukan komitmen abadi untuk kepentingan generasi muda bangsa."

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam rekonstruksi pengelolaan komite sekolah, sebagaimana dikemukakan Majir (2018:228) bahwa dalam menghadapi globalisasi pendidikan, perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk menjamin terbentuknya generasi yang kompeten. sesuai dengan tuntutan pembangunan. Masyarakat, sekolah, dan pemerintah bekerja sama tanpa memandang batasan ruang dan waktu. Hubungan antara sekolah dan masyarakat, menurut Majir (2018:226), adalah berkomunikasi untuk mengembangkan hubungan, yang dapat mendorong keterlibatan masyarakat dan menerima ide dan ajakan serta berusaha untuk menyukseskannya. Belajar bagaimana menciptakan komunikasi yang baik antara sekolah dan komite sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran setiap komunitas atau tanggung jawab sekolah untuk bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan pola hubungan tripusat pendidikan, maka kehadiran komite sekolah diproyeksikan akan memperbaiki pola hubungan di masa mendatang. Menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang acuan Pembentukan Komite Sekolah menjelaskan bahwa "komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah." Komite sekolah dalam pengertian tersebut dapat menjadi wadah peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Komite sekolah menurut Kepmendiknas

Nomor 044/U/2002 memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator.

Menurut Sri Renani Pantjastuti, dkk (2008:84), mengemukakan bahwa pelaksanaan peran dan fungsi komite sangat variatif. Terdapat komite sekolah yang bertindak sebagai "stempel" kepala sekolah. Artinya komite sekolah hanya "mengikuti" apa yang diprogramkan kepala sekolah. Komite sekolah kurang memiliki ide-ide inovatif dan kreatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kepala sekolah, di sisi lain, takut dengan komite sekolah. Posisi kepala sekolah sering menjadi bahan kritik dan pengawasan berlebihan oleh komite sekolah. Apalagi jika kepala sekolah tidak transparan, demokratis, atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Untuk memenuhi tugasnya, komite sekolah harus merancang program kerja dan manajemen yang efektif untuk mencapai tujuan ideal meningkatkan mutu pendidikan di lembaga terkait.

Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak akan terjadi peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu adalah strategi sistematis, terpadu, dan berjangka panjang untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar dan pedoman mutu yang telah ditetapkan (Kemdikbud, 2017:1). Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan semuanya merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Kemdikbud, 2017:3). Berbagai kenyataan yang terjadi lapangan bahwa masih banyaknya komite sekolah yang belum melaksanakan perannya dengan baik. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan judul "Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan."

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Firdauza Ardy Nugraha (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite sekolah berperan penting dalam pengembangan siswa dan peningkatan kualitas manajemen pendidikan, khususnya di lembaga sekolah. Sebelum mempertimbangkan kepala sekolah, komite sekolah melihat kemungkinan apa yang menjadi ambisi dan aspirasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan ini, serta keterampilan yang dapat diperoleh lulusannya.

Hal tersebut juga dikemukakan dalam penelitian Weny Firdausin Nuzula (2016) bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*Advisoryagency*) adalah memberikan pertimbangan mengenai penetapan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam hal sarana prasarana yang mendukung kegiatan akademik dan non akademik. Mengutamakan kemudahan proses belajar mengajar antara guru dan siswa di bidang akademik, termasuk sarana prasarana sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Karena komite sekolah adalah sebagai mitra dan partner sekolah, maka yang bisa dilakukan adalah bagaimana pertimbangan yang akan dilakukan apabila input madrasah melebihi kapasitas yang ada dengan memberikan penambahan ruang kelas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan penjelasan lebih rinci terkait keterhubungan peran sebagai pertimbangan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Standar pengelolaan, standar proses, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan semuanya berperan dalam kedudukan komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam peningkatan mutu pendidikan terkait indikator mutu pendidikan. Peran komite sekolah terkait dengan pengelolaan perencanaan dan pengelolaan program, sesuai standar pengelolaan. Fungsi komite sekolah dalam perencanaan pembelajaran, prosedur pembelajaran,

evaluasi, dan pengawasan terikat pada standar proses. Peran komite sekolah dalam standar sarana dan prasarana adalah memberikan pertimbangan dan gagasan atas sarana dan prasarana yang dapat disediakan sekolah. Peran komite sekolah dalam standar pembiayaan adalah memberikan pertimbangan anggaran yang dapat digunakan oleh sekolah.

2. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Dukungan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah (Hasbullah, 2006:97) mengemukakan bahwa peran komite sekolah sebagai pendukung sumber daya meliputi pemantauan kondisi tenaga pendidikan di sekolah, pengerahan tenaga guru sukarela di sekolah, pengerahan tenaga non guru di sekolah, dan pemantauan kondisi sarana dan prasarana di sekolah. Pengerahan bantuan sarana dan prasarana di sekolah, serta evaluasi pelaksanaan bantuan tersebut, merupakan bagian dari sarana dan prasarana pendukung. Pemantauan keadaan anggaran pendidikan di sekolah, pengorganisasian dukungan anggaran pendidikan di sekolah, koordinasi dukungan anggaran pendidikan di sekolah, dan evaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah semuanya termasuk dalam kategori dukungan anggaran.

Dalam hal ini komite sekolah sebagai pendukung peningkatan mutu pendidikan terlibat dalam memberikan dukungan sumber daya, sarana dan prasarana, serta anggaran. Pemantauan kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah, serta sarana dan prasarana di sekolah, memberikan dukungan untuk (1) sumber daya. Dukungan sumber daya pendidikan dikaitkan dengan indikator mutu pendidikan, khususnya standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan memantau ketersediaan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana dengan memantau kelengkapan dan kelayakan sarana dan prasarana.

Komite sekolah sebagai pemberi dukungan (2) berperan dalam memantau dan mengusulkan sarana dan prasarana sekolah. Komite sekolah memantau keadaan anggaran di sekolah untuk memberikan dukungan terhadap (3) anggaran. Peran tersebut berkaitan dengan standar pembiayaan. Anggaran untuk layanan subsidi silang, biaya operasional sekolah, dan pengelolaan dana sekolah dipantau dan dikoordinasikan oleh komite sekolah.

Hasil kajian juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian M. Misbah (2009) yang menyatakan bahwa komite sekolah kemudian dapat menindaklanjuti ketersediaan ketenagaan sekolah, memberdayakan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya masyarakat yang ada, dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang dilakukan komite sekolah bekerjasama dengan Dewan Pendidikan akan dipantau perkembangannya melalui evaluasi pelaksanaan dukungan atau bantuan tersebut, dan pemanfaatan sumber-sumber anggaran pendidikan yang ada pada masyarakat menjadi hal yang dibutuhkan mendesak.

Hasil penelitian dari Weny Firdausin Nuzula menambahkan bahwa peran komite sekolah sebagai badan pendukung (*supporting agency*), komite sekolah menjalankan perannya dengan berpartisipasi sebagai panitia dalam proses pengadaan sarana dan prasarana, penggalangan dana dari orang tua atau wali peserta didik, memberikan dukungan berupa daya pikir, motivasi, dan masukan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dukungan yang diberikan komite sekolah ini juga sampai pada tahap penghapusan, hal ini diwujudkan dengan keikutsertaan dalam pemilihan barang dan pemeriksaan sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai. Dengan demikian, komite sekolah sebagai lembaga pendukung pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat dikatakan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kebutuhan.

3. Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Menurut Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah dalam Hasbullah (2006:97-98), peran komite sekolah sebagai pengontrol adalah mengontrol perencanaan sekolah, yang meliputi pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di sekolah, penilaian kualitas kebijakan di sekolah, dan pengawasan proses perencanaan sekolah, perencanaan sekolah, pengawasan mutu perencanaan sekolah, dan pengawasan mutu program sekolah. Komite sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan program sekolah, yang meliputi pengawasan organisasi sekolah, penjadwalan program sekolah, pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, pengalokasian sumber daya untuk pelaksanaan program sekolah, dan memastikan partisipasi sekolah dalam program sekolah. Komite sekolah bertanggung jawab atas keluaran pendidikan, seperti menilai hasil ujian, angka partisipasi sekolah, angka mengulang sekolah dan angka bertahan sekolah.

Kajian tersebut selaras dengan penelitian M. Misbah (2009) yang antara lain menyatakan bahwa peran komite sebagai pengontrol adalah untuk mengontrol kualitas kebijakan yang ada, mengontrol proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada, untuk pengendalian pelaksanaan program. Pendidikan memantau pelaksanaan program-program yang ada di sekolah agar sesuai dengan kebijakan yang telah disusun. Dalam hal pelaksanaan program, bertugas mengalokasikan dana dan sumber daya untuk pelaksanaan program.

Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam peningkatan mutu pendidikan terkait dengan indikator mutu pendidikan yaitu standar isi dan standar kompetensi lulusan. Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam peningkatan mutu pendidikan berkaitan dengan peran pengendalian perencanaan sekolah, yaitu penilaian kebijakan mutu sekolah dan pengawasan mutu program sekolah. Kedua peran ini terkait dengan standar isi pengembangan kurikulum. Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam peningkatan mutu pendidikan terkait standar kompetensi lulusan adalah untuk mengontrol *output* pendidikan, yang meliputi penilaian ujian dan penilaian tingkat partisipasi sekolah.

Dalam penelitian Anita Putri Pertiwi (2018) menambahkan bahwa komite sekolah sebagai badan pengendali menjalankan perannya dalam menyetujui dan memantau kegiatan penggalangan dana sekolah, membantu sistem pemantauan dan evaluasi standar di sekolah, dan memantau pelaksanaan rekomendasi dalam laporan kinerja sekolah.

4. Peran Komite Sekolah sebagai Mediator dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Tujuan dibentuknya komite sekolah, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, adalah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka menghasilkan kebijakan dan program pendidikan yang dapat mendorong kemajuan sekolah, mendorong peningkatan peran dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, serta menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Peran komite sekolah sebagai mediator terkait dengan indikator mutu pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dalam (a) perencanaan, yaitu menjadi penghubung antara kepala sekolah dengan masyarakat, kepala sekolah dengan dewan pendidikan, dan kepala sekolah dengan sekolah. Dengan memperhatikan dan mengutamakan kemandirian, komite sekolah dan masyarakat senantiasa menjaga hubungan baik, menjalin hubungan kerja dengan sekolah lain, pengawas sekolah, dinas pendidikan, asosiasi profesi dunia usaha dan industri, serta masyarakat. Komite sekolah mengidentifikasi

aspirasi pendidikan masyarakat. Membuat proposal kebijakan dan program pendidikan pada rapat perencanaan sekolah. Sebagai mediator dalam pelaksanaan program, komite sekolah berperan mensosialisasikan kebijakan dan program pendidikan sekolah kepada masyarakat, serta memfasilitasi dengan menampung berbagai masukan dan gagasan tentang kebijakan yang dapat dilaksanakan sekolah, yang kemudian dikomunikasikan ke sekolah. Selain itu, komite sekolah menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah. Keluhan dan pengaduan tersebut dikomunikasikan untuk mencari solusi. Komite sekolah bertanggung jawab untuk mengidentifikasi (c) sumber daya masyarakat dan sekolah yang ada yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana.

Hasil kajian didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Misbah (2009) yang menyatakan bahwa komite sekolah berfungsi sebagai mediator dan menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Sebagai mediator pelaksanaan program pendidikan lebih banyak memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat atas kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan sekolah. Peran tersebut antara lain mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan pengaduan masyarakat terhadap sekolah terkait di bidang pendidikan. Sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat begitu besar, namun pemanfaatannya belum optimal, perlu adanya pemberdayaan kesediaan bantuan masyarakat untuk pendidikan.

Peran komite sekolah sebagai mediator dalam peningkatan mutu pendidikan terkait dengan beberapa indikator mutu pendidikan, antara lain standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Keterkaitan tersebut adalah peran komite sebagai mediator dalam membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah dan memfasilitasi berbagai masukan terhadap kebijakan program terhadap sekolah. Anita Putri Pertiwi (2018) menambahkan dalam penelitiannya yang mengemukakan bahwa sebagai mediator, komite sekolah diharapkan dapat berkolaborasi dengan masyarakat, termasuk individu, organisasi pemerintah, dan masyarakat untuk memberikan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Lebih lanjut, panitia diharapkan dapat menampung dan menganalisis aspirasi, gagasan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan masyarakat atau peserta didik.

Hasil penelitian yang telah dikemukakan tersebut berkaitan dengan pandangan Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah (Hasbullah, 2006: 98-99), peran komite sekolah sebagai mediator perencanaan antara lain menjadi penghubung antara Kepala Sekolah dengan masyarakat, Kepala Sekolah dengan Dewan Pendidikan, dan Kepala Sekolah dengan sekolah, mengidentifikasi aspirasi pendidikan di masyarakat, dan membuat usulan kebijakan dan program pendidikan bagi kepala sekolah. Sebagai mediator pelaksanaan program, meliputi sosialisasi kebijakan dan program pendidikan sekolah kepada masyarakat, memfasilitasi berbagai masukan atas kebijakan program terhadap sekolah, menampung pengaduan dan pengaduan terhadap kebijakan dan program pendidikan, serta menyampaikan pengaduan dan keluhan masyarakat kepada instansi terkait bidang pendidikan di sekolah. Mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah, mengidentifikasi sumber daya masyarakat, memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah, dan mengkoordinasikan bantuan masyarakat adalah tanggung jawab mediator sumber daya.

SIMPULAN

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan

pendidikan di satuan pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Adapun peran komite sekolah yaitu: peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, peran komite sekolah sebagai pendukung, peran komite sekolah sebagai pengontrol, dan peran komite sekolah sebagai mediator. Mutu pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan layanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan. Kesesuaian *input*, proses, dan hasil sekolah dengan tuntutan *stakeholders* merupakan kerangka filosofi pendidikan dalam mewujudkan sekolah yang bermutu. Landasan konseptual ini harus menjadi kerangka berpikir seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan di dalam satuan pendidikan. Mutu pendidikan adalah definisi dan ciri yang utuh dari keluaran pendidikan yang mampu menghasilkan produk/keluaran dan jasa pendidikan yang baik yang sesuai dengan tujuan dan tuntutan pelanggan atau pengguna jasa pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Putri Pertiwi. 2018. Efektivitas Peran Komite Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Se-Jakarta Utara. *Tesis*.
- Firdauza Ardy Nugraha. 2019. Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pengelolaan Pendidikan (Studi Kasus di SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. *Tesis*.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kemdikbud. 2017. *Indikator Mutu Pendidikan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Majir, Abdul. 2018. Rekonstruksi Hubungan Komite Sekolah dan Sekolah Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 10(2), 223-231.
- Menteri Pendidikan Nasional. Kepmendiknas Nomor 44/U/2002 Tentang Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Menteri Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Misbah. 2009. Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 14 (1), 68-91.
- Nur Zazin. 2011. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sri Renani Pantjastuti, dkk. 2008. *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Weny Firdausin Nuzula. 2016. Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Multi Kasus di MTS Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung). *Tesis*.